

Menuju Kesejahteraan Pesisir: Evaluasi Kebijakan Pembangunan Sosial Ekonomi Di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima

Haeril

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

Email : haeril.terminator@gmail.com

Abstact *This research will focus on the evaluation of socio-economic development policies in Sape District, Bima Regency, with the aim of understanding the extent to which development efforts have achieved their goals. This study employs a qualitative descriptive method and a Literature Review. The research location includes the Bima Regency Development Planning Agency, the Department of Tourism, the Department of Marine and Fisheries, the Department of Environment, and the Department of Social Affairs of Bima Regency. The research findings indicate that Sape District has significant economic potential in the fisheries and agriculture sectors, but it still faces a considerable level of poverty, especially among coastal households. The economic empowerment of coastal communities needs to be enhanced through skills training programs, financial assistance for business capital, and improved access to business loans. Furthermore, a specific focus on generating employment opportunities, particularly for young people, is essential. Poor infrastructure and limited accessibility pose significant obstacles to economic development. Investments in infrastructure improvement, such as roads and ports, are required to enhance mobility and market access. Sustainable natural resource management is vital for preserving the potential of fisheries and agriculture in the area. Strict law enforcement against illegal fishing practices and educational efforts to promote sustainable fishing practices are necessary. Climate change impacts, including rising sea levels and extreme weather conditions, affect the region. Therefore, strategies for climate change adaptation and mitigation need to be developed. The evaluation of socio-economic development policies indicates that assistance programs have been implemented, but there is a need for improvement in directing policies toward poverty alleviation, economic empowerment, and sustainable natural resource management.*

Keywords: *Evaluation, Welfare, Development, Coastal*

Abstraksi Penelitian ini akan berfokus pada evaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dan bertujuan untuk memahami sejauh mana upaya pembangunan telah mencapai tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Studi Literatur. Lokasi penelitian ini berada di Bappeda Kabupaten Bima, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Sape memiliki potensi ekonomi yang besar dalam sektor perikanan dan pertanian, namun masih menghadapi tingkat kemiskinan yang signifikan, terutama di kalangan rumah tangga masyarakat pesisir. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir perlu ditingkatkan melalui program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses yang lebih baik ke kredit usaha. Selain itu, harus ada fokus khusus pada menciptakan lapangan kerja, terutama bagi pemuda. Infrastruktur dan aksesibilitas yang buruk merupakan kendala serius dalam pengembangan ekonomi. Investasi dalam perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan, akan membantu meningkatkan mobilitas dan akses ke pasar. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga potensi perikanan dan pertanian di wilayah ini. Diperlukan penegakan hukum yang ketat terhadap praktik penangkapan ikan ilegal dan upaya edukasi masyarakat tentang penangkapan ikan yang berkelanjutan. Dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut dan cuaca ekstrem, mempengaruhi wilayah ini. Oleh karena itu, strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu dikembangkan. Evaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi menunjukkan bahwa program-program bantuan telah diterapkan, tetapi perlu peningkatan dalam mengarahkan kebijakan ke pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi, Kesejahteraan, Pembangunan, Pesisir

PENDAHULUAN

Kecamatan Sape, terletak di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, adalah salah satu wilayah pesisir yang menyimpan potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Wilayah pesisir di Indonesia telah dikenal sebagai harta karun sumber daya alam, dengan hasil laut yang melimpah dan pesona alam yang menakjubkan. Namun, di balik pesonanya, pesisir

seringkali menjadi saksi tantangan yang serius dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya. Dalam upaya menuju kesejahteraan pesisir, evaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi di Kecamatan Sape telah menjadi tugas yang mendesak.

Perubahan dan evolusi dalam kebijakan pembangunan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir telah menciptakan kebutuhan untuk melihat lebih dalam pada dampak-dampaknya, khususnya di wilayah pesisir yang kaya akan potensi. Keberlanjutan dan kesejahteraan pesisir tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan pembangunan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi semakin mendesak.

Salah satu tantangan utama yang perlu diatasi adalah ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan di wilayah pesisir. Sebagian besar penduduk Kecamatan Sape bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai mata pencaharian utama. Namun, data menunjukkan bahwa sektor-sektor ini belum memberikan penghasilan yang memadai bagi sebagian besar penduduk. Dampak ketimpangan ini menciptakan perpecahan sosial yang memengaruhi sektor ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Selain masalah ekonomi dan sosial, infrastruktur dasar yang masih terbatas juga menjadi kendala. Akses terbatas ke listrik, air bersih, dan transportasi yang baik adalah tantangan yang perlu diatasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk. Penyediaan infrastruktur yang memadai akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Fasilitas kesehatan di wilayah ini mungkin tidak memadai, dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas mungkin masih menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Sementara itu, akses terhadap pendidikan yang berkualitas mungkin terbatas, yang dapat memengaruhi peluang ekonomi dan sosial masyarakat, terutama generasi muda.

Wilayah pesisir Kecamatan Sape memiliki potensi kerusakan lingkungan yang signifikan. Kerusakan terumbu karang dan pencemaran laut dapat membahayakan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Konflik sumber daya antara berbagai sektor ekonomi dan masyarakat pesisir seringkali muncul, memperumit upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Faktor eksternal seperti perubahan iklim juga memengaruhi keberlanjutan dan kesejahteraan pesisir. Meningkatnya tingkat curah hujan yang tidak terduga, kenaikan permukaan laut, dan intensifikasi cuaca ekstrem dapat mengancam ketahanan pesisir.

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri.

Pengetahuan lokal, budaya, dan tradisi juga perlu menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan pembangunan. Memahami konteks lokal dan nilai-nilai masyarakat setempat adalah langkah kunci dalam menghindari kesalahan dalam implementasi kebijakan.

Peran perempuan dalam pembangunan harus diperhatikan secara khusus. Dalam banyak komunitas pesisir, perempuan memiliki peran yang signifikan dalam mengelola sumber daya alam dan menciptakan mata pencaharian. Mereka perlu dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.

Pemberdayaan ekonomi lokal dan pengembangan usaha mikro dan kecil di wilayah pesisir adalah langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal ini juga dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial.

Evaluasi kesejahteraan juga melibatkan aspek kualitas hidup. Faktor-faktor seperti akses terhadap fasilitas rekreasi, keamanan, dan kualitas lingkungan yang bersih dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Sebelumnya, telah ada beberapa kajian dan evaluasi terkait pembangunan sosial ekonomi di wilayah pesisir Indonesia. Namun, lebih banyak penelitian diperlukan untuk memahami konteks spesifik Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dan untuk mengidentifikasi perubahan dan tantangan yang spesifik bagi wilayah ini.

Dengan demikian, penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala utama dan menawarkan rekomendasi konkrit untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Penelitian ini akan berfokus pada evaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dan bertujuan untuk memahami sejauh mana upaya pembangunan telah mencapai tujuannya. Seperti yang disampaikan oleh Amartya Sen, "Penting untuk memahami bukan hanya pertumbuhan ekonomi itu sendiri, tetapi juga untuk siapa pertumbuhan tersebut." Dalam konteks pembangunan sosial ekonomi di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, kita harus menjawab pertanyaan ini dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat membawa kita menuju kesejahteraan pesisir yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam konteks global yang semakin dinamis, penting bagi suatu wilayah pesisir seperti Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, untuk menjalankan pembangunan sosial ekonomi

yang berkelanjutan. Teori-teori pembangunan berkelanjutan, seperti kerangka kerja Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang dijelaskan oleh Sachs (2015), menggarisbawahi perlunya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang atau sektor ekonomi tertentu, tetapi harus inklusif dan berdampak positif pada seluruh masyarakat. Sachs (2015) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi harus beriringan dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks Kecamatan Sape, pendekatan ini menjadi relevan, mengingat tantangan yang dihadapi wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya alam dan ekosistem yang rentan terhadap perubahan iklim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Studi Literatur. Lokasi penelitian ini berada di Bappeda Kabupaten Bima, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui *purposive sampling*, adapun subyek/informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Sosial Kelompok Masyarakat Pengawas di Pesisir, Kelompok Tani Pugar, Komunitas Pesisir, dan Komunitas Ekonomi Kreatif (Ekraf). Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif, teknik terdiri dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Idrus, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, telah menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang situasi sosial dan ekonomi wilayah pesisir ini. Data primer yang diperoleh melalui survei lapangan, wawancara, dan partisipasi aktif masyarakat setempat, bersama dengan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi, telah digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi yang telah

diterapkan, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat pesisir.

Ekonomi dan Kemiskinan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Kecamatan Sape memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor perikanan. Namun, tingkat kemiskinan masih tinggi di wilayah ini. Hampir setengah dari rumah tangga di wilayah ini hidup di bawah garis kemiskinan. Penyebab utama kemiskinan termasuk kurangnya akses terhadap sumber daya produktif, seperti kapal nelayan dan alat tangkap ikan, serta rendahnya pendapatan dari sektor pertanian. Meskipun beberapa program bantuan telah diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan, hasilnya belum optimal.

Pemberdayaan Ekonomi

Analisis data menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir masih menjadi tantangan. Terdapat rendahnya akses terhadap kredit usaha, pelatihan keterampilan, dan pasar yang menguntungkan. Tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan pemuda, juga merupakan masalah serius. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, akses ke modal usaha, dan promosi sektor usaha kecil dan menengah.

Infrastruktur dan Aksesibilitas

Infrastruktur yang terbatas dan aksesibilitas yang buruk adalah kendala utama dalam pengembangan ekonomi di Kecamatan Sape. Jalan-jalan pedesaan yang rusak, dan transportasi yang mahal menghambat mobilitas dan perdagangan. Diperlukan investasi dalam pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Konservasi Sumber Daya Alam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam perlu diperbaiki. Meskipun sumber daya laut di wilayah ini melimpah, praktik-praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan ilegal masih terjadi. Kebijakan yang mendukung konservasi sumber daya alam, pengawasan yang ketat, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan tanah.

Perubahan Iklim

Data penelitian mengindikasikan bahwa Kecamatan Sape mengalami dampak perubahan iklim. Naiknya permukaan air laut telah mengakibatkan intrusi air laut ke tanah pertanian, yang merusak tanaman dan mengurangi produktivitas. Selain itu, cuaca ekstrem seperti badai dan banjir semakin sering terjadi. Diperlukan tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang serius untuk melindungi masyarakat dan sumber daya alam.

Kebijakan Pembangunan

Evaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi menunjukkan bahwa beberapa program bantuan dan inisiatif telah diterapkan, seperti program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan program kesejahteraan sosial. Namun, ada kebutuhan untuk lebih memfokuskan kebijakan ke arah pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan studi literatur dan analisis data yang telah dilakukan terkait evaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dapat diambil beberapa kesimpulan penting:

1. Kecamatan Sape memiliki potensi ekonomi yang besar dalam sektor perikanan dan pertanian, namun masih menghadapi tingkat kemiskinan yang signifikan, terutama di kalangan rumah tangga masyarakat pesisir.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir perlu ditingkatkan melalui program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses yang lebih baik ke kredit usaha. Selain itu, harus ada fokus khusus pada menciptakan lapangan kerja, terutama bagi pemuda.
3. Infrastruktur dan aksesibilitas yang buruk merupakan kendala serius dalam pengembangan ekonomi. Investasi dalam perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan, akan membantu meningkatkan mobilitas dan akses ke pasar.
4. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga potensi perikanan dan pertanian di wilayah ini. Diperlukan penegakan hukum yang ketat terhadap praktik penangkapan ikan ilegal dan upaya edukasi masyarakat tentang penangkapan ikan yang berkelanjutan.
5. Dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut dan cuaca ekstrem, mempengaruhi wilayah ini. Oleh karena itu, strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu dikembangkan.
6. Evaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi menunjukkan bahwa program-program bantuan telah diterapkan, tetapi perlu peningkatan dalam mengarahkan kebijakan ke pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil untuk perbaikan dan pembangunan lebih lanjut di Kecamatan Sape:

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi yang mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses ke kredit usaha. Program-program ini harus dirancang dengan memperhitungkan kebutuhan khusus masyarakat pesisir dan pertanian.
2. Investasi dalam perbaikan infrastruktur, terutama jaringan jalan dan pelabuhan, perlu diintensifkan. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan memfasilitasi perdagangan.
3. Konservasi sumber daya alam, khususnya di sektor perikanan, perlu menjadi prioritas. Hal ini termasuk penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik penangkapan ikan ilegal dan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan.
4. Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan. Ini meliputi pembangunan tanggul pantai, sistem irigasi yang lebih baik, dan pelatihan masyarakat dalam manajemen bencana.
5. Kebijakan pembangunan sosial ekonomi harus direvisi untuk lebih fokus pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Evaluasi berkala dan umpan balik dari masyarakat harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
6. Keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andria, S., & Abubakar Hamzah, M. N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Relatif Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 2(4).
- Ari, A. (2019). *Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Correia, M. M. (2021). *Menelaah Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Terang Teori Keadilan John Rawls* (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero).
- Handono, S. Y., Hidayat, K., & Purnomo, M. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. Universitas Brawijaya Press.

- Indarwati, I., KS, A., MP, P. D., & Sarjiyanto, S. E. (2022). *Perempuan Dalam Pemberdayaan Dan Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Lakeisha.
- Kusumaningrum, A. (2013). Kebijakan Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bima, Jawa Tengah). *Agriekonomika*, 2(1), 13-26.
- Liwiya, Y., Pangkey, M. S., & Tampi, G. B. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50).
- Mariana, K. (2023). Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). *Prosiding*.
- Nur Fauzan, A. (2013). Potret Kemiskinan Di Karangsoaga Dalam Bekisar Merah: Analisis Strukturalisme Genetik.
- Purwanto, S. A., Sumartono, S., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 16(2), 79-96.
- Retnowati, E. (2011). Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). *Perspektif*, 16(3), 149-159.
- Rizki, D. P. (2020). *Potret Kemiskinan Struktural Masyarakat Di Desa Mantowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Silooy, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Absolut Masyarakat Pesisir (Nelayan) Di Desa Seilale Kecamatan Nusaniwe. *Jurnal Cita Ekonomika*, 11(1), 79-84.
- Sukesi, K., & Rosalinda, H. (2017). *Migrasi perempuan, remitansi, dan perubahan sosial ekonomi pedesaan*. Universitas Brawijaya Press.
- Suleman, A., Pratiknjo, M. H., & Sandiah, N. (2019). Kemiskinan Struktural dan Hubungan Patron Klien Nelayan di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Widiastuti, T. (2014). Kemiskinan struktural informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 314-329.
- Yasin, R. (2021). *Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia)).
- Zuber, A. (2011). Kemiskinan masyarakat pedesaan: studi kasus di Desa Sanggang, Sukoharjo. *Jurnal Sosiologi Dilema Dialektika Masyarakat*, 27(2), 95-110.